

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dengan hadirnya virus yang berasal dari Wuhan, China yaitu *Corona Virus Disease 2019* atau *Covid-19*. Tak hanya Indonesia, *Corona Virus* telah lebih dulu menyebar di hampir seluruh negara di dunia. Masuknya virus corona di Indonesia pada bulan Maret 2020 ditandai dengan kasus *Covid-19* pertama nyatanya cukup meningkatkan kekhawatiran di benak masyarakat. Diketahui bahwa *Corona Virus* merupakan virus yang belum pernah ditemui sebelumnya, sehingga perlu adanya penyesuaian pada awalnya. Dilihat berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari virus *Covid-19* cukup berdampak bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. Untuk menjaga penularan Virus Corona, Pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah atau lebih baik jika tidak berkegiatan di luar rumah terlebih dahulu.

Penanganan penyebaran virus *Covid-19* menjadi fokus utama bagi Pemerintah Kota Semarang. Untuk mempercepat penanganan *Covid-19*, Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Semarang Pasal 3 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa: <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kota Semarang.

Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan pembatasan Kegiatan Masyarakat meliputi:

- a. Penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja;
- c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. pembatasan kegiatan di tempat umum;
- e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; dan
- f. pergerakan orang menggunakan moda transportasi.

**Tabel 1. 1 Data Kasus Terpapar *Covid-19* Tahun 2020-2021 di Kota Semarang**

No	Tahun	Kasus Meninggal	Kasus Sembuh	Total Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2020	1.625	18.011	19.663
2	2021	4.848	64.688	69.536
<b>Total</b>				<b>89.199</b>

Sumber: *siagacorona.semarangkota.go.id*

Berdasarkan data mengenai total kasus terpapar selama tahun 2020-2021 yang hanya 2 tahun tersebut mencapai angka 89.199 kasus. Angka yang sangat tinggi tersebut pastinya memunculkan kekhawatiran ditengah masyarakat. Pandemi *Covid-19* menjadi masa yang cukup berat bagi pemerintah, lantaran tak hanya dibidang kesehatan, sektor ekonomi, sosial, dan pariwisata juga merasakan dampak berupa kemerosotan yang signifikan. Didapati dari sumber serupa, Kota Semarang menjadi kota yang terdampak *Covid-19* hingga harus memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat selama 12 kali dalam 2 tahun.

Hadirnya *Covid-19* hingga menyebabkan sebuah pandemi juga memengaruhi aspek perekonomian di Kota Semarang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu aspek yang terkena dampak *Covid-19*. Diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang mengalami penurunan dikarenakan banyak sektor di bidang ekonomi merasakan dampaknya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Angka 20, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Salah satu sumber Pendapatan asli Daerah yaitu retribusi daerah, yang dijelaskan pula pada UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 22. Pada undang-undang tersebut menjelaskan, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 87, jenis retribusi terdiri atas:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Bentuk dari retribusi yaitu dengan wajib membayar atas layanan yang

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

digunakan/dinikmati. Salah satu jenis retribusi yang cukup memberikan pemasukan tinggi kepada pemerintah daerah yaitu retribusi pasar.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Semarang menerapkan pembayaran retribusi pasar secara elektronik melalui inovasi program e-retribusi. Penggunaan teknologi sebagai sarana pelayanan publik merupakan 3 prinsip dalam konsep *good governance* menurut UNDP yaitu akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dan efisiensi. Penggunaan teknologi sebagai sarana pelayanan publik juga menjadi salah satu bentuk realisasi dari konsep *e-government* yang mulai diberlakukan di Indonesia dan selanjutnya di realisasikan melalui konsep *smart city* yang diterapkan di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah menerapkan konsep *smart city* sejak tahun 2013. Dalam penerapannya, Pemerintah Kota Semarang menggunakan konsep *smart city* yaitu *monitorable* (dapat dipantau), *systematic* (sistem yang terhubung), *reliable* (dapat dipercaya), serta *time bound* (batasan waktu). Fokus dari adanya konsep *smart city* di Kota Semarang adalah Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan kemudahan, kepercayaan, dan ketepatan bagi warga Kota Semarang.<sup>3</sup>

Akan tetapi, pada tahun 2020, pendapat retribusi daerah dan selanjutnya pendapatan retribusi pasar Kota Semarang mengalami penurunan. Seperti yang diketahui bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun awal dimana terjadi pandemi *Covid-19* di Indonesia, alhasil pendapatan retribusi daerah dan retribusi pasar di

---

<sup>3</sup> Eko Mulyawan Satrio dan Agus Rochani, "Efektivitas Penerapan Konsep Smart City Ditinjau dari Aspek Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang", *Jurnal Pondasi*, Vol. 24 No. 2, (2019) hlm. 135.

Kota Semarang harus mengalami penurunan. Data mengenai pendapatan retribusi daerah dan retribusi pasar dapat dilihat pada tabel 1.2.

**Tabel 1. 2 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dan Retribusi Pasar Kota Semarang Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi Retribusi Pasar
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2018	107.822.774.730	12.288.325.266
2	2019	113.679.802.209	15.933.308.850
3	2020	88.883.130.703	10.033.796.612

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan retribusi pasar pada tahun 2020 mengalami penurunan Rp 5.899.512.238,00 atau sebesar 23% lantaran pada tahun tersebut merupakan tahun pertama Pandemi *Covid-19*. Hal yang sama juga terjadi pada realisasi pendapatan retribusi daerah yang menurun Rp 24.796.671.506,00 atau sebesar 12%. Penurunan pendapatan pemerintah daerah terkhusus retribusi pasar, tentunya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. Meskipun pandemi *Covid-19* merupakan hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, namun dalam permasalahan ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih untuk menyeimbangkan ekonomi di daerah. Disisi lain, tidak hanya berpengaruh dalam pendapatan, Pandemi *Covid-19* di Kota Semarang juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Semarang melalui beberapa kebijakan yang dikeluarkan juga berdampak pada kegiatan di pasar tradisional. Larangan membuka kios/ toko, los, dan tenda ditujukan kepada pedagang pasar dengan tujuan untuk mengurangi penularan virus *Covid-19* di Kota Semarang.

Pembayaran retribusi pasar harus dibayarkan setiap hari dan tidak boleh diborongkan, di sisi lain banyak pedagang yang mengeluhkan pembayaran retribusi pasar setiap hari karena pendapatan yang didapatkan oleh para pedagang juga menurun. Hal tersebut juga menyebabkan pembayaran retribusi pasar yang terhambat sehingga juga mempengaruhi pendapatan retribusi pasar Kota Semarang.

Kota Semarang merupakan daerah dengan kasus *Covid-19* tertinggi Jawa Tengah yang didominasi oleh tiga kecamatan yaitu Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Barat, dan Kecamatan Tembalang. Keadaan tersebut juga meningkatkan kekhawatiran masyarakat serta mempengaruhi kondisi pasar tradisional di Kota Semarang.

**Tabel 1. 3 Data Pasien Meninggal *Covid-19* Tertinggi di Kota Semarang Tahun 2020-2021**

No	Kecamatan	Meninggal Positif
(1)	(2)	(3)
1.	Kecamatan Pedurungan	196 Pasien
2.	Kecamatan Tembalang	194 Pasien
3.	Kecamatan Semarang Barat	160 Pasien
4.	Kecamatan Banyumanik	134 Pasien
5.	Kecamatan Ngaliyan	131 Pasien
6.	Kecamatan Semarang Selatan	97 Pasien
7.	Kecamatan Candisari	85 Pasien
8.	Kecamatan Semarang Timur	81 Pasien
9.	Kecamatan Genuk	77 Pasien
10.	Kecamatan Semarang Utara	76 Pasien
11.	Kecamatan Semarang Tengah	67 Pasien
12.	Kecamatan Gunungpati	55 Pasien
13.	Kecamatan Gajamungkur	51 Pasien
14.	Kecamatan Gayamsari	50 Pasien
15.	Kecamatan Tugu	31 Pasien
16.	Kecamatan Mijen	30 Pasien
<b>Total</b>		<b>1.515 Pasien</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2021

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tiga kecamatan dengan kasus *Covid-19* tertinggi yaitu Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Semarang Barat dengan total kasus meninggal positif yaitu 550 orang oleh karena itu dapat merepresentasikan kondisi *Covid-19* terhadap operasional pasar-pasar tersebut. Penelitian ini dilakukan pasar tradisional yang berada di 3 kecamatan dengan jumlah pasien meninggal positif tertinggi di Kota Semarang yaitu Pasar Pedurungan yang berada di Kecamatan Pedurungan, Pasar Kedungmundu yang berada di Kecamatan Tembalang, dan Pasar Karangayu yang berada di Kecamatan Semarang Barat.

Penurunan pendapatan retribusi pasar di Kota Semarang juga mempengaruhi keberjalanan pemerintahan di Kota Semarang, lantaran target pendapatan retribusi daerah yang di dalamnya juga mencakup pendapatan retribusi daerah telah ditetapkan serta di cantumkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Sehingga, juga berpengaruh dengan pemenuhan target yang ada. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pendapatan, Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas untuk kembali mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar yang terjadi pada tahun 2020.

Berdasarkan uraian situasi pasar tradisional pada masa pandemi *Covid-19* yang cukup berdampak pada penurunan omset pedagang dan pembayaran retribusi pasar di Kota Semarang. Pemaparan tersebut melatarbelakangi dalam melangsungkan penelitian dengan judul “Retribusi Pasar dan *Covid-19* (Strategi Manajemen Krisis Pandemi *Covid-19* Pemerintah Kota Semarang dalam Mengatasi Penurunan Pendapatan Retribusi Pasar Tahun 2020-2021)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan strategi manajemen krisis pandemi *Covid-19* Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2021?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan strategi manajemen krisis pandemi *Covid-19* Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2021?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan strategi manajemen krisis pandemi *Covid-19* Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2021.
2. Untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan strategi manajemen krisis pandemi *Covid-19* Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2021.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat terkait keberjalanan perekonomian



pada masa Pandemi *Covid-19* khususnya dalam hal penurunan pendapatan retribusi pasar di Kota Semarang. Dalam hal ini masyarakat dapat mengetahui manajemen krisis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan dampak *Covid-19* pada sektor perekonomian khususnya pada penurunan pendapatan retribusi pasar.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan pedagang pasar tradisional sebagai bagian dari masyarakat dapat lebih patuh dalam membayar retribusi pasar berdasarkan fasilitas pasar seperti toko/kios, los, dan tenda yang merupakan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, dapat mengetahui dari implementasi kebijakan-kebijakan yang diberlakukan untuk menghadapi dampak ekonomi khususnya penurunan pendapatan retribusi pasar di Kota Semarang pada masa pandemi *Covid-19*.

#### **1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan beberapa penelitian yang pernah diteliti oleh beberapa orang sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Penelitian ini untuk memberikan penjelasan bahwa penelitian ini tidak memplagiasi penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian terdahulu berupa beberapa artikel yang termuat dalam jurnal yang telah diteliti dan memiliki relevansi dengan pembahasan Pendapatan retribusi pasar pada masa pandemi *Covid-19*.

2.5.1 Penelitian terdahulu dari diploma tesis dengan judul “Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar di Masa *Covid-19* di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu” yang ditulis oleh Aditya Pratama<sup>4</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan upaya peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar di masa *Covid-19* di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif.

Hasil dari penelitian ini adalah Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah Melalui Retribusi Pasar Di Masa *Covid-19* Di Kabupaten Mukomuko belum berjalan dengan baik, karena masih mempunyai beberapa hambatan. Hasil retribusi pasar di Kabupaten Mukomuko terbilang kecil karena tidak adanya UPTD pasar yang mengurus. Penarikan retribusi pasar diurus oleh desa dimana pasar tersebut berada melalui masyarakat yang telah dikontrak, kemudian hasil retribusi diserahkan ke Disperindag sehingga uang retribusi sudah terpotong dua kali dari hasil retribusi. Pada saat pandemi *Covid-19*, pendapatan retribusi pasar tidak menurun karena di awal tahun

---

<sup>4</sup> Aditya Pratama, *Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar di Masa Covid-19 di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu*, Diploma Thesis IPDN, 2021.

sebelum masuknya *Covid-19* telah disepakati harga setoran perbulan dalam satu tahun, sehingga pendapatan yang masuk meningkat dibanding tahun sebelumnya. Akan tetapi dari petugas yang menarik retribusi yang justru merasakan penurunan pendapatan.

2.5.2 Penelitian selanjutnya dari jurnal dengan judul “Respon Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dalam Kebijakan Pengelolaan Pasar Tumenggungan di Masa Pandemi *Covid-19*” yang ditulis oleh Kabul Prasmita dan Sunarto<sup>5</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Pandemi *Covid-19* terhadap kegiatan perekonomian di Pasar Tumenggungan Kebumen serta mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai respon terhadap dampak pandemi *Covid-19* di Pasar Tumenggungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah *Covid-19* rupanya cukup memberikan dampak kepada perekonomian di Pasar Tumenggungan Kebumen. Dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian di Pasar Tumenggungan Kebumen antara lain, kondisi pasar yang sepi pedagang dan pengunjung, penurunan pemasukan pedagang, dan perputaran uang yang semakin lambat. Berdasarkan dampak tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen selaku

---

<sup>5</sup> Kabul Prasmita dan Sunarto, “Respon Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen dalam Kebijakan Pengelolaan Pasar Tumenggungan di Masa Pandemi *Covid-19*”, *Unnes Political Science Journal*, Vol. 5 No. 2, (2021) hlm. 55-56.

pengelola dan penanggung jawab Pasar Tumenggunangan menetapkan beberapa kebijakan sebagai bentuk manajemen krisis antara lain, pemasangan banner dan stiker himbauan, pengadaan fasilitas cuci tangan, pengadaan bantuan masker, woro-woro protokol kesehatan, pemantauan kegiatan pasar, sterilisasi pasar, pengadaan *rapid test*, pengurangan jumlah karyawan masuk, dan pengurangan target pendapatan. Berkaitan dengan pengurangan pendapatan mencakup mengenai pengurangan pendapatan (target) pelayanan pasar dan retribusi kebersihan pasar yaitu sekitar 20%. Manajemen krisis yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen perihal dampak *Covid-19* terhadap perekonomian di Pasar Tumenggunangan dapat dikatakan baik, namun seiring berjalannya waktu kurang adanya perhatian.

2.5.3 Penelitian terdahulu dari tesis yang berjudul “Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kota Bandar Lampung” yang ditulis oleh Rachman Sandy Putra Agung.<sup>6</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan pemungutan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masa Pandemi *Covid-19*, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perdagangan Kota

---

<sup>6</sup> Rachman Sandy Putra Agung, *Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Bandar Lampung*, Diploma Thesis IPDN, 2021.

Bandar Lampung, dan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor retribusi pasar.

Hasil dari penelitian ini adalah Peran Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung kaitannya dengan retribusi pasar sudah berjalan dengan baik, namun belum bisa dikatakan optimal. Hal tersebut dikarenakan oleh perlu adanya penyederhanaan administrasi retribusi, masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, serta perlunya meningkatkan SDM. Minimnya sarana dan prasarana pasar, kebersihan dan keamanan, data wajib retribusi yang belum akurat, lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran wajib retribusi, serta kurangnya pembeli pada masa pandemi *Covid-19* menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan optimalisasi retribusi pasar. Berdasarkan penjelasan diatas, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung melakukan beberapa upaya untuk mengoptimalkan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu meningkatkan protokol kesehatan yang baik, meningkatkan pelaksanaan pengawasan pembayaran retribusi pasar, meningkatkan kualitas aparat, serta adanya evaluasi kerja mengenai pelaporan penerimaan retribusi pasar.

2.5.4 Penelitian terdahulu dari jurnal yang berjudul “Strategi Pemerintah dalam Optimalisasi Retribusi di Pasar Brang Biji” yang ditulis oleh Edrial, Muhammad Yamin, dan Muhammad Taufik Hidayat.<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab menurunnya pendapatan retribusi yang ada di Pasar Brang Biji dan mengetahui strategi pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam optimalisasi pendapatan dari retribusi di Pasar Brang Biji. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam meningkatkan pendapatan retribusi pasar di Pasar Brang Biji, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan beberapa strategi yaitu melakukan sosialisasi dan promosi serta menjelaskan kepada masyarakat pentingnya membuka usaha di Pasar Brang Biji, memberikan kemudahan dalam pembayaran retribusi secara mingguan, bulanan, ataupun tahunan, dan menyediakan fasilitas pasar secara lengkap di Pasar Brang Biji. Namun melalui beberapa kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan retribusi tersebut, pemerintah Kabupaten Sumbawa menemui beberapa hambatan yaitu diberlakukan PPKM akibat adanya pandemi *Covid-19*, kurangnya minat masyarakat yang berdagang, kurangnya jumlah petugas kebersihan pasar, serta kurangnya jumlah pedagang di Pasar Brang Biji. Dengan adanya hambatan tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan retribusi pasar khususnya di Pasar Brang

---

<sup>7</sup> Edrial, Muhammad Yamin, dan Muhammad Taufik Hidayat, “Strategi Pemerintahan Dalam Optimalisasi Retribusi Pasar Brang Biji”, *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 2, (2022) hlm. 216-218.

Biji maih belum mencapai target dan perlunya ada evaluasi terkait strategi dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Penelitian dengan berfokus pada pelaksanaan manajemen krisis pemerintah daerah dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar selama pandemi *Covid-19* telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Dalam penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperkuat dan mengulik lebih mengenai strategi pemerintah daerah untuk mengatasi dampak penurunan pendapatan retribusi pasar pada masa pandemi *Covid-19* khususnya di Kota Semarang.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dapat memberikan rekomendasi dan referensi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui dampak yang ditimbulkan dari pendemi *Covid-19* terhadap pembayaran retribusi. Selain itu, hasil dari penelitian yang telah dilakukan diketahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani terhambatnya pembayaran retribusi serta penurunan pendapatan retribusi khusunya retribusi pasar pada saat pandemi *Covid-19*.

Permasalahan yang terjadi dalam pembayaran retribusi ditemukan di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia. Terlebih lagi dengan adanya pandemi *Covid-19*, ditetapkan beberapa kebijakan terkait pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak bagi semua aspek kehidupan khususnya perekonomian di kota maupun kabupaten di Indonesia. Adanya penelitian ini

maka dapat diketahui pemilihan dan pelaksanaan strategi manajemen krisis pandemi *Covid-19* Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar tahun 2020-2021 untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam menangani dampak dari adanya krisis pandemi *Covid-19* serta dapat merumuskan upaya dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar. Untuk itu permasalahan ini merupakan hal baru yang menarik dan perlu diteliti pada penelitian yang akan dilakukan.

## **1.6 Kerangka Teori**

### **1.6.1 Manajemen Krisis**

Keberjalanan suatu pemerintahan atau sebuah organisasi tidak dapat dihindarkan dari adanya situasi mendesak yang dapat berdampak bagi aspek yang ada di dalamnya dan dapat mempengaruhi kualitas dari pemerintah atau organisasi. Situasi yang mendesak dapat hingga dapat dikatakan krisis menjadikan sebuah pemerintahan lebih waspada akan dampak lainnya yang ditimbulkan. Sebuah krisis dalam keberjalanan pemerintahan dapat diartikan bahwa adanya situasi yang mendesak serta mengancam dari kualitas pemerintahan tersebut kedepannya. G. Harison menyampaikan pendapatnya mengenai krisis,<sup>8</sup>

*“Krisis adalah suatu keadaan kritis yang berkaitan dengan berbagai kemungkinan yang berpengaruh negatif terhadap organisasi, sehingga diperlukan keputusan cepat dan tepat agar tidak mempengaruhi keseluruhan organ organisasi”.*

---

<sup>8</sup> Made Widya Sekarbuana, I Gusti Agung Alit Setyawati, Ni Nyoman Dewi Pascarani, “Strategi Manajemen Krisis Public Relation PT, Angkasa Pura I Gusti Ngurah Rai Bali dalam Menghadapi Dampak Erupsi Gunung Agung 2017”, *E-Jurnal Medium*, Vol. 1 No. 2, (2018) hlm. 4.



Krisis dalam sebuah organisasi memiliki tahapan krisis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dilakukannya manajemen krisis. Krisis dapat dibedakan berdasarkan tipe, menurut Claudia Reinhard krisis dapat dikategorikan berdasarkan waktu, sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Krisis bersifat segera (*Immediately crises*)

Berdasarkan tipe krisis ini, krisis terjadi begitu tiba-tiba, tidak terduga dan tidak diharapkan sehingga tidak ada waktu untuk melakukan riset dan perencanaan.

2. Krisis baru muncul (*emerging crises*)

Tipe krisis ini masih memungkinkan untuk dilakukan penelitian dan perencanaan terlebih dahulu, namun krisis bisa semakin parah apabila terlalu lama ditangani.

3. Krisis bertahan (*suistained crises*)

Tipe krisis ini adalah krisis yang tetap muncul selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun walaupun telah dilakukan upaya terbaik oleh pihak manajemen perusahaan atau organisasi untuk mengatasinya.

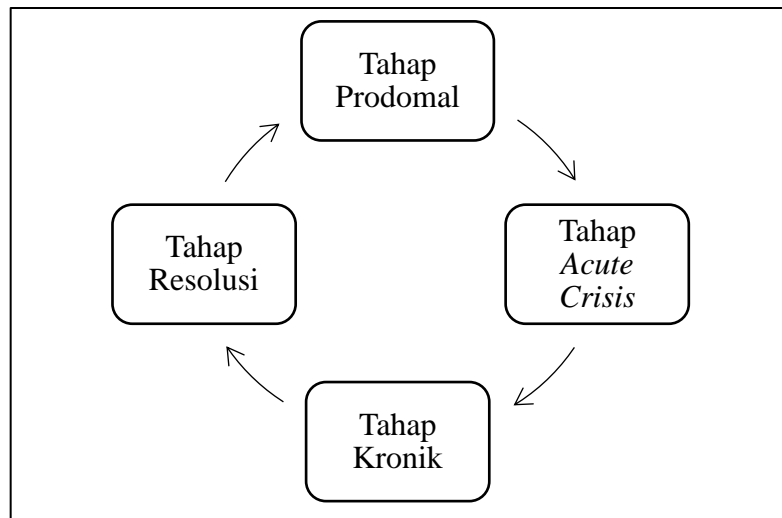
Berdasarkan penjelasan tipe krisis, Steven Fink menyampaikan pendapatnya mengenai tahap perkembangan krisis, sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kiki Handayani, Erman Anom, "Peran PR Menerapkan Manajemen Krisis dalam Memulihkan Citra PT. Garuda Indonesia Pasca Kecelakaan Pesawat Boeing G.737/400 di Yogyakarta"

<sup>10</sup> Rhenald Kasali, Manajemen Public Relation, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm. 226-230.

**Gambar 1. 1 Tahap Perkembangan Krisis**



Sumber: Kasali, Rhenald, 2003

1. Tahap Prodomal

Tahap prodomal merupakan tahap yang dapat dikatakan peringatan terhadap kemunculan krisis dan harus segera ditangani dengan cepat.

2. Tahap *acute crisis*

Tahap ini merupakan sudah mulai terbentuk adanya krisis karena sudah diketahui oleh sebuah organisasi/ perusahaan/ pemerintahan sehingga sudah mulai dilakukan manajemen krisis yang telah disusun.

3. Tahap kronik

Pada tahap ini dapat dikatakan sebuah organisasi/ perusahaan/ pemerintahan tidak mengalami krisis dan dapat dilakukan *the clean phase*, yang ditandai dengan berubahnya sistem bahkan kebijakan.

#### 4. Tahap resolusi

Tahap resolusi merupakan tahap yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi seperti semula dan dirumuskan strategi pemulihan agar mencegah adanya krisis kembali.

Berdasarkan konsep krisis yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan manajemen krisis untuk menekan dampak krisis yang dihasilkan. Rhenald Kasali menyampaikan pendapatnya mengenai manajemen krisis<sup>11</sup>

*“Manajemen krisis adalah proses untuk mengelola krisis yang mencakup identifikasi krisis, analisa krisis, isolasi krisis, strategi pemulihan dan program pengendalian”.*

Menangani sebuah krisis harus dilakukan secara serius dengan merancang rencana manajemen krisis yang bertujuan untuk mencegah krisis semakin luas dan mempengaruhi aspek lainnya, sehingga diperlukan strategi manajemen krisis yang tepat untuk meminimalisir dampak. Rhenald Kasali menjelaskan tahapan dalam mengelola krisis, antara lain:<sup>12</sup>

##### 1. Identifikasi Krisis

Tahap identifikasi yang merupakan tahap awal dapat membantu untuk mengetahui masalah awal dari terjadinya sebuah konflik.

##### 2. Analisa Krisis

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas dari tahap identifikasi krisis. Biasanya dalam tahap ini menggunakan formula 5W+1H yang bertujuan untuk menjabarkan sebuah krisis.

---

<sup>11</sup> Rhenald Kasali, *Ibid.* 231

<sup>12</sup> Rhenald Kasali, *Ibid.* 231-232.

### 3. Isolasi Krisis

Setelah diketahui segala hal mengenai krisis ini, tahap isolasi krisis dapat dilakukan untuk mencegah meluaskannya krisis pada aspek lainnya.

### 4. Strategi Pemulihan Krisis, ada 3 strategi generik untuk menangani krisis, yaitu:

#### a) *Defensive Strategy*

- 1) Mengulur waktu
- 2) Tidak melakukan apa-apa
- 3) Membentengi diri dengan kuat

#### b) *Adaptive Strategy*

- 1) Mengubah kebijakan
- 2) Perubahan operasional
- 3) Kompromi
- 4) Membenahi citra

#### c) *Dynamic Strategy*

- 1) Akuisisi dan merger
- 2) Investasi baru
- 3) Menggandeng kekuasaan
- 4) Menjual saham
- 5) Meluncurkan produk baru/ menarik peredaran
- 6) Melempar isu baru untuk mengalihkan perhatian

### 5. Program Pengendalian

Program pengendalian merupakan tahap yang dilakukan menuju strategi generik yang dirumuskan. Program pengendalian biasanya disusun pada saat krisis muncul.

Teori manajemen krisis sebagai teori utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui upaya pemerintah daerah dalam mengatasi penurunan pendapatan yang disebabkan oleh krisis yaitu *Covid 19*. Peran manajemen krisis dalam pemerintahan adalah dapat menjadi pedoman dalam menangani keadaan krisis yang memengaruhi aspek keberjalanan pemerintahan atau dalam penelitian ini yaitu aspek pendapatan. Selain itu,

melalui teori manajemen krisis dapat diketahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menangani krisis terkait penurunan pendapatan serta kaitannya dengan pemilihan strategi dan pelaksanaannya.

### 1.6.2 *Theory of Planned Behavior*

*Theory of planned behavior* dapat dijadikan hal untuk meyakinkan seseorang dalam berperilaku. Icek Ajzen menjelaskan *Theory of Planned Behavior* (TPB) bahwa,<sup>13</sup>

*“Theory of Planned Behavior adalah perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu behavioral beliefs, normative beliefs, perceived control beliefs”.*

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Ajzen, seseorang dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, antara lain:<sup>14</sup>

#### 1. *Behavioral beliefs* (Sikap terhadap sesuatu)

*Behavioral beliefs* merupakan dasar dalam seseorang berperilaku karena semakin positif seseorang dalam melihat sesuatu maka semakin menghendaki untuk melakukan perbuatan itu.

#### 2. *Normative beliefs* (Norma Subjektif)

*Normative Beliefs* adalah sesuatu yang dapat dipahami ataupun tidak dapat dipahami yang pada memunculkan kepercayaan seseorang yang pada akhirnya dapat mempengaruhi individu pada suatu perilaku.

---

<sup>13</sup> Widi Hidayat dan Argo Adhi Nugroho, “Studi Empiris *Theory of Planned Behavior* dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 12 No. 2, (2010), hlm. 85.

<sup>14</sup> Icek Ajzen, “The Theory of Planned Behavior”, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50 No. 2, (1991), hlm. 188-189.

### 3. *Perseived control beliefs* (kontrol perilaku persepsian)

*Perseived control beliefs* merupakan sebagai pemahaman mengenai sederhana atau kompleksnya dalam melakukan perbuatan atas dasar pengalaman terdahulu dan kendala yang dapat dicari solusinya dalam melakukan suatu perbuatan.

Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention* (niat), kemudian tahap terakhir adalah behavior (kebiasaan). Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku.

Teori ini merujuk pada pembentukan kebiasaan baru masyarakat yang disebabkan oleh adanya pandemi *Covid 19* yang dirasa asing dan belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga melalui teori ini dijelaskan adanya faktor-faktor yang dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih sadar dan terbiasa. Selanjutnya dalam teori ini dapat melihat penerimaan pedagang dengan strategi yang dipilih serta pedagang dapat beradaptasi dengan baik.

## **1.7 Operasionalisasi Konsep**

### **1.7.1 Definisi Konsep**

Adapun definisi konseptual yang digunakan adalah

#### 1. Manajemen krisis

Manajemen krisis adalah suatu proses yang harus dilakukan dalam situasi kritis atau mendesak yang dapat memengaruhi keadaan sebuah organisasi

dengan alur penyelesaian sehingga dapat ditemukan keputusan serta dapat menciptakan keadaan yang lebih baik.

## 2. *Theory of Planned Behavior*

*Theory of Planned Behaviour* adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia yang didasari oleh niat hingga menjadi sebuah kebiasaan.

### 1.7.2 Definisi Operasional

Penelitian ini untuk mengetahui strategi manajemen krisis pandemi *Covid-19* Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar tradisional pada tahun 2020-2021. Dalam definisi operasional yang digunakan penulis merujuk tahapan strategi manajemen krisis menurut Rhenald Kasali. Indikatornya adalah sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi Krisis

Tahap identifikasi yang merupakan tahap awal dapat membantu untuk mengetahui masalah awal dari terjadinya sebuah konflik.

#### 2. Analisa Krisis

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas dari tahap identifikasi krisis. Biasanya dalam tahap ini menggunakan formula 5W+1H yang bertujuan untuk menjabarkan sebuah krisis.

#### 3. Isolasi Krisis

Setelah diketahui segala hal mengenai krisis ini, tahap isolasi krisis dapat dilakukan untuk mencegah meluaskannya krisis pada aspek lainnya.

4. Strategi Pemulihan Krisis, ada 3 strategi generik untuk menangani krisis, yaitu:

a. *Defensive Strategy*

- 1) Mengulur waktu
- 2) Tidak melakukan apa-apa
- 3) Membentengi diri

b. *Adaptive Strategy*

- 1) Mengubah kebijakan
- 2) Perubahan operasional
- 3) Kompromi
- 4) Membenahi citra

c. *Dynamic Strategy*

- 1) Akuisisi
- 2) Investasi baru
- 3) Menggandeng kekuasaan

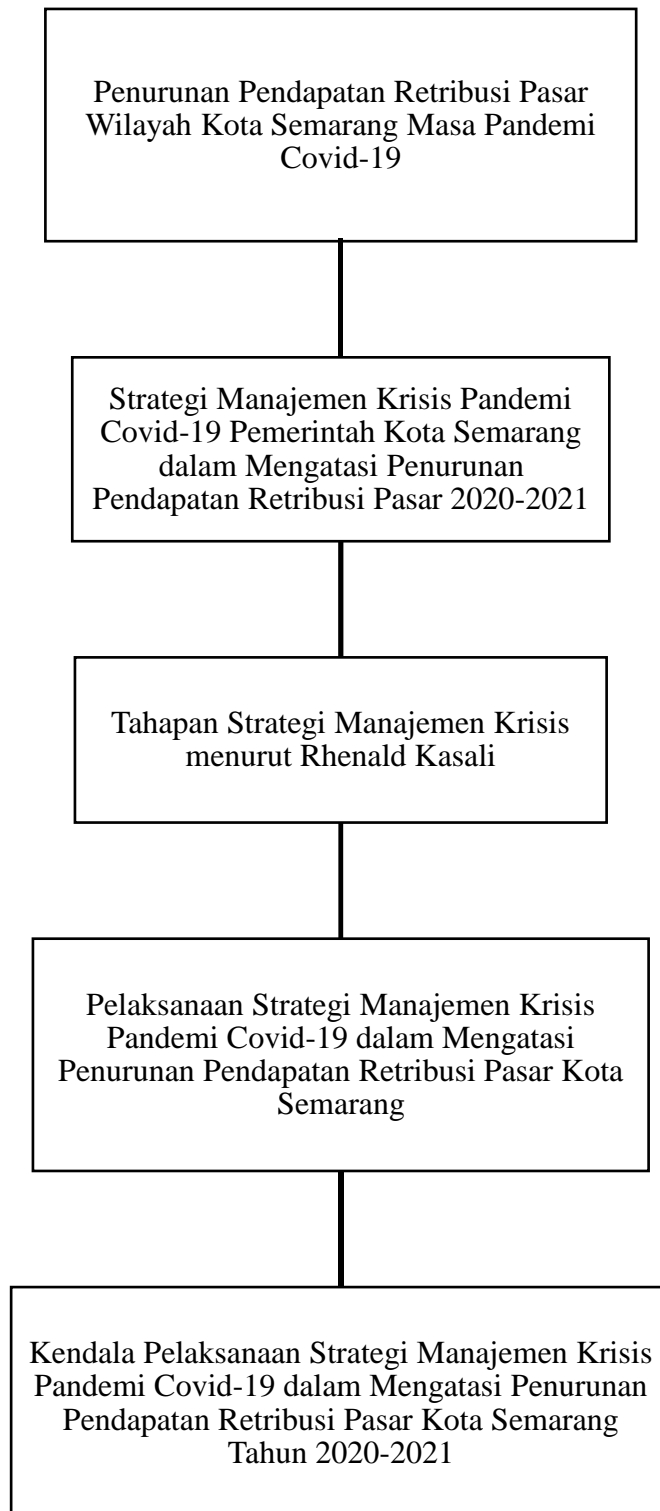
5. Program Pengendalian

Pada tahap akhir ini bertujuan untuk mengendalikan dari strategi yang telah dipilih.

Indikator tersebut nantinya juga dapat digunakan untuk mengetahui pelaksanaan tahapan manajemen krisis *Covid-19* dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar pada tahun 2020-2021, yang kemudian dapat diketahui upaya pemerintah Kota Semarang merespon serta menyelesaikan permasalahan penurunan pendapatan ini. Selain itu, dengan dilakukannya strategi manajemen krisis dapat melihat perubahan yaitu peningkatan pendapatan atau justru semakin menurun. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh hal lain seperti kesadaran masyarakat hingga pada akhirnya kembali meningkatkan kesadaran masyarakat meskipun dengan keadaan baru yaitu *Covid-19* yang dalam penelitian ini adalah pedagang pasar untuk membayar retribusi pasar.



## 1.8 Kerangka Berpikir



## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu untuk mengetahui penerapan strategi manajemen krisis Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar pada pandemi *Covid-19* tahun 2020-2021.

### **1.9.2 Lokasi Penelitian**

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Maka dari itu, penulis memilih Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengenai retribusi pasar dan Pasar Pedurungan, Pasar Kedung Mundu, dan Pasar Karangayu.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah informan yang dapat memberikan informasi berupa data-data penelitian melalui proses wawancara. Penentuan dalam sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah penentuan sampel dari populasi tanpa memperhatikan strata. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *simple random sampling* diperuntukan pasar tradisional di Kota Semarang yang terletak di tiga kecamatan dengan kasus meninggal positif *Covid-19* tertinggi. Subjek dalam penelitian ini antara lain:

1. Dwi Adhi Cahyono S.ST, MT selaku Sub Koordinator Pendapatan  
Dinas Perdagangan Kota Semarang

2. Ahmad Munif, S.E., M.M. selaku Kepala Pasar Pedurungan Kota Semarang
3. 13 pedagang Pasar Pedurungan sebagai objek retribusi pasar, antara lain:

**Tabel 1. 4 Daftar Informan Pedagang Pasar Pedurungan**

No.	Nama Pedagang	Jenis Dagangan
(1)	(2)	(5)
1.	Hatta	Bumbu masakan
2.	Aji	Sembako
3.	Romasih	Sembako
4.	Surati	Sayur-mayur
5.	Wibowo	Alat-alat kebersihan
6.	Tasilah	Pakaian
7.	Isnawati	Pakaian
8.	Piya	Pakaian
9.	Susilowati	Warung Makan
10.	Saadah	Parut Kelapa
11.	Diah	Daging
12.	Faqih	Daging
13.	Hartini	Jamu

Sumber: Data peneliti, 2023

4. 3 Pedagang Pasar Kedung Mundu Kota Semarang

**Tabel 1. 5 Data Informan Pasar Kedung Mundu**

No.	Nama Pedagang	Jenis Dagangan
(1)	(2)	(5)
1.	Putri	Sembako
2.	Marsiti	Sembako dan sayuran
3.	Jumiati	Sayur mayur

## 5. 3 Pedagang Pasar Karangayu Kota Semarang

**Tabel 1. 6 Data Informan Pasar Karangayu**

No.	Nama Pedagang	Jenis Dagangan
(1)	(2)	(5)
1.	Sri Rahayu	Bunga dan jamu
2.	Royani	Buah
3.	Sri	Buah

### 1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data merupakan sesuatu yang dapat dijadikan dasar dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data:

#### a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data didapatkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan aparatur Dinas Perdagangan Kota Semarang sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab dalam mengelola Pendapatan Retribusi Kota Semarang. Selain itu, data primer yang peneliti gunakan yaitu hasil wawancara dengan pengelola pasar dan pedagang di Pasar Pedurungan , Pasar Kedung Mundu, dan Pasar Karangayu Kota Semarang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, misalnya dalam dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data yang diperoleh dari buku, laporan, internet, jurnal, repository (skripsi, tesis, dan

disertasi). Pada Penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu laporan pendapatan retribusi pasar Kota Semarang tahun 2020-2021 yang diperoleh dari Dinas Perdagangan.

#### **1.9.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada objek penelitian mengenai hal yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mengetahui keadaan dan pendapat para pedagang pasar pembayaran retribusi di masa pandemi *Covid 19* yang lalu. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan para pedagang pasar Pedurungan Semarang. Selain itu, peneliti melakukan wawancara Dinas Perdagangan Kota Semarang yang merupakan pihak pemerintah, pengelola pasar dan pedagang Pasar Pedurungan, Pasar Kedung Mundu, dan Pasar Karangayu sebagai objek kebijakan.

#### **1.9.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun data yang telah didapatkan secara sistematis yang sesuai dengan tujuan penelitian serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami.

a. Reduksi data

Menurut Mile dan Huberman, Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>15</sup> Pada tahap ini peneliti akan memberikan gambaran secara lebih jelas terkait topik penelitian yaitu pelaksanaan strategi manajemen krisis Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi penurunan pendapatan retribusi pasar pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020-2021.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini pelaksanaan strategi manajemen krisis Pemerintah Kota Semarang dalam penurunan pendapatan retribusi pasar pada masa pandemi *Covid-19* tahun 2020-2021 di Pasar Pedurungan, Pasar Kedung Mundu, dan Pasar Karangayu Kota Semarang. Melalui penyajian data maka data dalam penelitian dapat tersusun secara sistematis sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Verifikasi dan membuat kesimpulan merupakan kegiatan mengartikan dan menyajikan data yang nantinya akan ditampilkan. Kesimpulan dapat diartikan sebagai suatu bentuk yang utuh yang dilakukan penulis dalam menyusun suatu penelitian. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

---

<sup>15</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian*, (Bandung:Citapustaka Media, 2012) hlm. 147.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.